



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS NUSA CENDANA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ANNYTHA INA ROHI DETHA
2. Jabatan : WAKIL REKTOR I (BIDANG AKADEMIK)
3. NHK : 1008600

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 782.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/195 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 491.000.000
2. Tanah Seluas 1.365 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 196.000.000
3. Tanah Seluas 309 m2 di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 185.000.000

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA G MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 162.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 125 L1F02N36L1 A/T Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 35.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.201.600.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.203.600.000

III. HUTANG Rp. 53.424.438

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.150.175.562

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.